

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GORONTALO
(STUDI KASUS DESA HIMALAYA)**

Oleh

**ASER MURIB
H1116096**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
STUDI KASUS DESA HIMALAYA**

OLEH :

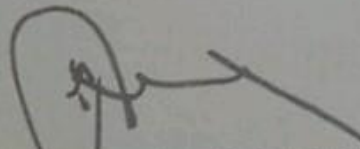
**ASER MURIB
NIM :H.11.16.096**

SKRIPSI

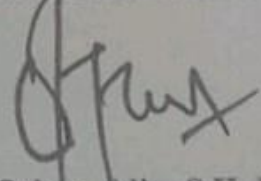
**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**

Menyetujui:

PEMBIMBING I


Dr. Rusmulvadi, S.H.,M.H.
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II


Saharuddin, S.H.,M.H.
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
EFEKTIVITAS SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GORONTLO
STUDI KASUS DESA HIMALAYA

OLEH:
ASER MURIB
NIM : H.11.16.096

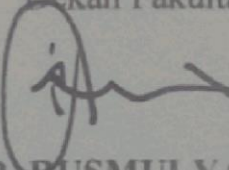
SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.

1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H	Ketua	(.....)
2. Suardi Rais S.H., M.H	Anggota	(.....)
3. Haritsa, S.H., M.H	Anggota	(.....)
4. Dr. Rusmulyadi S.H., M.H	Anggota	(.....)
5. SAharuddin, S.H., M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Karya Tulis Saya (Skripsi) judul : Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten gorontalo studi kasus Desa Himalaya Ini Adalah Asli Dan Belum Pernah Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana) Baik Di Univeritas Ichsan Gorontalo Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya Tulis Ini Adalah Murni Gagasan ,Rumusan Dan Penelitian Saya Sendiri, Tanpa Bantuan Pihak Lain Kecuali Secara Tertulis Arahan Tim Pembimbing Saya.
3. Dalam Karya Tulis Ini Tidak Terdapat Karya Atau Pendapat Yang Telah Dipublikasikan Orang Lain,Kecuali Secara Terlulis Di Cantumkan Sebagai Acuan Dalam Naskah Dengan Disebutkan Nama Pengarang Dan Di Cantumkan Dalam Daftar Pustaka.
4. Pertanyaan Ini Saya Buat Dengan Sesungguhnya Dan Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Penyimpangan Dan Ketidak Benaran Dalam Pernyataan Ini,Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Akademik Berupa Pencabutan Gelar Yang Telah Diperoleh Karena Karya Tulis Ini,Serta Sanksi Lainnya Sesuai Dengan Norma Yang Berlaku Di Perguruan Tinggi Univertas Ichsan Gorontalo.

PERNYATAAN

Gorontalo 27 Mei 2023


ASIER M. H.
Nim: H111111111



ABSTRAK

ASER MURIB. H1116096. EFEKTIVITAS SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GORONTALO

(STUDI KASUS DESA HIMALAYA)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana proses pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Gorontalo di Desa Himalaya dan (2) mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses sosialisasi KPU Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum adalah untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepada daerah Kabupaten Gorontalo (studi kasus desa Himalaya) dan (2) sosialisasi tentang tata cara dalam pemilihan Kepala daerah Kabupaten Gorontalo dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa.



Kata kunci: sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum, partisipasi politik

ABSTRACT

ASER MURIB. H1116096. THE EFFECTIVENESS OF SOCIALIZATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION TO INCREASE POLITICAL PARTICIPATION IN THE REGIONAL HEAD ELECTION OF GORONTALO DISTRICT (A CASE STUDY OF HIMALAYA VILLAGE)

This study aims to: (1) find out how the general election process increases political participation in the Gorontalo Regency regional head election in Himalaya Village and (2) find out what factors that hinder the socialization process of the General Election Commission of Gorontalo district. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach. A qualitative approach is a research procedure that produces descriptive data, which is stated by respondents in writing or orally and the reality in the field. The results of this study indicate that (1) the effective process of socialization of the General Election Commission is to increase political participation in the election to the Gorontalo District (a case study of Himalaya village) and (2) socialization of procedures in the election of the Head of Gorontalo District is carried out to increase the participation of the village community.



Keywords: *socialization, General Election Commission, political participation*

MOTO

Hal Yang Lebih Banyak Menyerah Tanpa Mencoba

(lorenha tanebeth)

2(Dua) Musuh Ialah Penundaan Dan Alasan

(jaya setiabudi)

Sebenarnya

kehidupan itu sederhana hanya saja kitalah yang mempersulitkan

Tidak Bersyukur Itulah Salah Satunya

Persiapkan Diri Hari Ini

Bertempur Hari esok

Kemudian Menang Dan Berhasil Di Hari Lusa

(Susilo Bambang Yudhoyono)

Hidup Ini Sama Dengan Kita Membhawa Kenderan Bermotor Di Jalan Raya Terkadang

Kita Berhenti Jalan Raya,

Terkadang Kita Lajuh

Yang Mengatur Kita Adalah Lampu Merah Dan Hijau

(Laganus Murib)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Maha Esah, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Calon Peneliti, sehinggadapat merampungkan Usulan Penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Usulan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai Judul:**Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Gorontalo**
(Studi Kasus Desa Himalaya)

Ucapan terima kasih Calon Peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak,Ibu Saya Yang Telah Membersarkan Saya Merawat Saya Kecil Sampai Sekarang.
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. H. Gafar Latjokke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo dan Juga Sekaligus Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Suardi Rais,S.H.,M.H Selaku Wakil II Bidang Administrasi Dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
7. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Akhirnya atas segala kekhilafan kepada semua pihak baik yang disengaja maupun tidak, menulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat memaafkannya,dan dengan segala kerandahan hati penulis mengharapkan agar Semoga Bantuan serta arahan yang dan Dorongan Yang Calon Peneliti Terima Dari Semua Pihak Dapat Menjadi Petunjuk Kearah Masa Depan Yang Lebih Baik. AMIN

Gorontalo, 27 MEI 2023
Penelitian

ASER MURIB
Nim:H1116096

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHANPEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHANPENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRASK.....	v
ABSRAKCT.....	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tinjauan sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	10
2.1.1. PengertianEfektivitas	11
2.1.2. factor-Efektivitas Sosialisasi kpu	12
2.1.3. Kriteria Efektivitas.....	13
2.2. Tinjauan sosialisasi Politik	15
2.2.1. Pengertian sosialisasi kpu	15
2.2.2. Sosialisasi Politik	17
2.3. Tinjauan Partisipasi	17
2.3.1. Pengertian Partisipasi	17
2.3.2. Partisipasi Politik	18
2.3.3. Cara Meningkatkan Partisipasi	19

2.4. Kerangka Pikir	21
2.5. Definisi Operasional.....	22
BAB.III. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian.....	25
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	25
3.4. Populasi Dan Sampel	26
3.4.1 . Populasi	26
3.4.2.Sampel.....	26
3.5. Jenis Dan Sumber Data	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Analisa Data	28
BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAAN.....	29
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.2.1.bagaimana efektivitas sosialisasi kpu meningkatkan partisipasi masyarakat kabupaten gorontalo.....	29
4.2.2.apa saja kendala kpu kabupaten gorontalo sosialisasi masyarakat desahimalaya	39
BAB V.PENUTUP	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	58
Lampiran-lampiran	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Jadi, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia ialah dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum atau Pemilu. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berpedoman pada zaman ini, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.KPU Provinsi Gorontalo selaku lembaga yang diberi kewenangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab, hak dan kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Provinsi Gorontalo dengan bertugas merencanakan,

Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut suatu negara.Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara.Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokratis dalam kedaulatan rakyat.¹

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.²

Pemilihan umum merupakan sarana penyaluran aspirasi bagi masyarakat³

terhadap pemerintahan. Pada pemilihan umum, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan yang akan

memimpin mereka sebagai presiden dilembaga eksekutif selama lima tahun kedepan. Perubahan-perubahan situasi politik sebagai konsekuensi dari tuntutan demokratisasi tentunya akan berpengaruh pada pemerintahan ditingkat lokal. Proses demokratisasi mulai tampak dalam kehidupan politik. Berbagai perubahan dalam sistem pemilihan umum dan adanya prinsip otonomi daerah akan memberikan warna baru dalam pola rekrutmen Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pemilihan yang dilaksanakan ditingkat lokal seperti Pemilihan umum kepala daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi aktif menentukan siapa yang patut memimpin daerah mereka. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dikelola oleh sebuah lembaga negara yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum. Komisi pemilihan umum menyelenggarakan pemilihan umum dengan cakupan wilayah kerja secara nasional, berkesinambungan dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum terdiri dari KPU sebagai lembaga nasional, KPU provinsi sebagai lembaga penanggung jawab penyelenggaraan pemilu pada tingkat provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sebagai Penanggung jawab

Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk memberikan suaranya dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial dimasyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik.⁸ Rendahnya partisipasi politik umumnya muncul karena sikap apatis dan sikap apriori terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka seperti bekerja, berolahraga, klub sosial, bertamasya dan sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik. Faktor lain yang juga erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah dengan tingkat pendidikan masyarakat, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Inilah yang menjadi ironi di banyak negara berkembang, dimana tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, sehingga berimbas

pada tingkat partisipasi masyarakat pada agenda politik yang umumnya tergolong rendah

Pasal 13 huruf r dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gorontalo punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat terutama bagi pemilih Kabupaten Gorontalo

merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemilu Kepala Daerah KPU Kabupaten Gorontalo memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat kabupaten Gorontalo Upaya meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan oleh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.

Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah cenderung mengalami meningkat jika dilihat sejak dimulainya era pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2008. Pada tahun tersebut angka partisipasi politik mencapai 59.21 % dan pada tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat mencapai angka 64,7%.¹¹ Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekan angka golput sebenarnya sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi pemilihan oleh KPU. Namun disisi lain masyarakat meminta pihak penyelenggara lebih kreatif dan aktif melakukan sosialisasi

sehingga upaya meningkatkan partisipasi dalam pemilihan semakin bertambah umur demokrasi maka seharusnya semakin tinggi pula angka partisipasi politik.

Memilih pemimpin memang wajib, tetapi dalam urusan atau perkara yang dibenarkan oleh hukum. Ketentuan ini berlaku, jika ada sekelompok orang minimal tiga atau lebih, masing-masing mempunyai urusan yang sama (umur musytarakah) dan urusan mereka sama-sama dibenarkan oleh hukum. Kesimpulan ini ditarik dari nash hadis yang menyatakan;

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten gorontalo a desa Himalaya

JUDUL;Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo

Studi Kasus efektivitas sosialisasi Di Desa Himalaya

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. bagaimana Efektivitas Sosialisasi Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah kpu Kabupaten gorontalo?
2. Apa saja kendala KPU kabupaten gorontalo dalam melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemilihan Kepala Daerah ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah kabupaten gorontalo
- b. Untuk mengetahui kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah kabupaten gorontalo Untuk mengetahui efektivitas komisi pemilihan umum dalam sosialisasi pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah kabupaten gorontalo

1. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat dijadikan suatu pengalaman dan pembelajaran tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat kabupaten gorontalo, serta menambah wawasan bagi penulis sendiri terhadap peran Komisi Pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kabupaten gorontalo Desa Himalaya
- b. Sebagai salah satu persyaratan untuk penelitian untuk proposal fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Hukum khususnya jurusan Hukum Tata Negara dan dosen-dosen Fakultas Hukum yang lainnya.

- d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisis masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

1.4. manfaat penelitian

Memberikan kontribusi seberapa jauh kesandaran politik masyarakat desa Himalaya dalam mengikuti pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo

a. Manfaat teoritis

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang segala fenomena efektivitas sosialisasi komisi pemilihan untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah kab.gorontalo

- b. manfaat praktis secara praktis penelitian ini dijadikan sebagai Untuk bahan informasi pengambilan keputusan,khususnya bagi para penegak hukum,sehingga terhadap upaya meningkatkan partisipasi politik dengan kemampuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah partisipasi politik pemilihan kepala daerah

- c. sebagaimana bahan literature untuk penelitian lanjutan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literature atau pun referensi sebagai bahan perbandingan bagi penelitian di masa-masa yang akan datang.

- d. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberi masukan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

E Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program serta menentukan metode sosialisasi kpu untuk meningkatkan partisipasi pemilihan kepala daerah

kabupaten gorontalo didesa Himalaya yang tepat untuk mengembangkan dan meningkatkan sosialisasi politik kedepannya sebagai masyarakat demokrasi pemilu serentak

f. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan efektivitas sosialisasi pemilu untuk masa akan datang yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan untuk KPU Kabupaten sosialisasikan dan meningkatkan harapan masyarakat desa

BAB.II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Sejarah lembaga KPU yang ada sekarang KPU keempat yang dibentuk sejak era reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres NO 16 tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama dilantik Presiden B.J. Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres NO 10 tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan

adil. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilihan .

Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan

Efektivitas menurut Limbong adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu tepat pada waktunya.

Menurut Raihani mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Menurut Yuniarsih mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

Selanjutnya menurut Nainggolan menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam

jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif. Berbagai pendapat telah dikemukakan para ahli di atas, dan kesemuanya menunjukkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program, dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya. Serta efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

1.1.2. Efektivitas Sosialisasi

Adapun Terdapat Efektivitas Sosialisasi ada Empat Kelompok Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Organisasi Yaitu:

1. Karakteristik Organisasi, Termasuk Struktur Efektivitas Sosialisasi kpu
2. Karakteristik Lingkungan Internal Dan Lingkungan Eksternal;
3. Karakteristik Karyawan;
4. Kebijakan Praktik manajemen waktu

Menurut Makmur Mengungkapkan Indikator Efektivitas Dilihat Dari Beberapa Segi Kriteria Efektivitas sosialisasi Sebagai Berikut :

- a. Ketepatan Waktu. Adalah Sesuatu Yang Dapat Menentukan Keberhasilan Sesuatu Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Sebuah Efektivitas sosialisasi Tapi Juga Dapat Berakibat Terhadap Kegagalan Suatu Aktivitas Organisasi. Penggunaan Waktu Yang Tepat Akan Menciptakan Efektivitas Pencapaian Tujuan Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya
- b. Ketepatan Perhitungan Biaya Berkaitan Dengan Ketepatan Dalam Pemanfaatan Biaya, Dalam Arti Tidak Mengalami Kekurangan Juga Sebaliknya Tidak Mengalami Kelebihan Pembiayaan Sampai Suatu Kegiatan Dapat Dilaksanakan Dan Diselesaikan Dengan Baik. Ketepatan Dalam Menetapkan Satuan-Satuan Biaya Merupakan Bagian Daripada Efektivitas sosialisasi
- c. Ketepatan Dalam Pengukuran. Dengan Ketepatan Ukuran Sebagaimana Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya Sebenarnya Merupakan Gambaran Daripada Efektivitas Kegiatan Yang Menjadi Tanggung Jawab Dalam Sebuah Efektivitas sosialisasi kpu sehingga Menemukan Yang Terbaik Diantara Yang Baik Atau Yang Terjujur Diantara Yang Jujur Atau Kedua-Duanya Yang Terbaik Dan Terjujur Diantara Yang Baik Dan Jujur

1.1.3. Kriteria Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas

dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

kriteria efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber daya yang ada. Kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif ada dua yaitu

1. kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan dapat tercapai
2. kejelasan strategi pencapaian tujuan, efektivitas sosialisasi KPU telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan efektivitas sosialisasi Komisi Pemilihan Umum pada untuk meningkatkan partisipasi pemilihan kepala daerah

Menurut Rihardini mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu;

- a. pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Sebuah program dikatakan efektif jika

telah teapat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit

- b. adaptasi adalah kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah pengisian tenaga kerja sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dari pelaksana program itu sendiri. Peran aktif dari pelaksana program juga termasuk di dalam adaptasi program, agar tujuan dari sebuah program dapat tercapai secara maksimal. Serta adanya tanggapan program dari lingkungan luar seperti keinginan sasaran, dan kualitas dari program itu sendiri. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya;

2.2.Tinjauh pengertian Sosialisasi Politik

2.2.1. Pengertian sosialisasi kpu

Metode Sosialisasi tentu merumuskan beragam jenis sosialisasi tidak bisa asal-asalasan.penting untuk memahami karakter masyarakat maupun menggunakan media efektif dalam menyampaikan berbagai sosialisasi dan upaya menyebarluaskan informasi yang cukup efektif.

Sosialisasi pemilu merupakan salah satu paling penting meningkatkan bagian dari sosialisasi politik. Dalam hal ini sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal jenis sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga

berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (Kpu), disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum. Selanjutnya dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015, sosialisasi pemilihan umum disebut sosialisasi pemilihan. Adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pemilu adalah suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut undang-undang dan ketentuan berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pemilu. Adapun tujuan sosialisasi pemilu yaitu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggungjawab.

2.2.2. Sosialisasi Politik

Setelah membahas mengenai tahapan penyelenggaraan sosialisasi politik selanjutnya membahas tentang sosialisasi politik mengenai politik secara langsung. Dawson menyebutkan empat metode dalam melakukan sosialisasi politik secara

langsung yaitu imitation (imitasi) *anticipatory political socialization* (sosialisasi politik antisipatoris) political education (edukasi politik) dan (pengalaman politik)

1. Imitasi (Imitation) merupakan prosesi sosialisasi politik yang paling awal dilakukan. Berbentuk peniruan setiap nilai, kepercayaan, sikap serta harapan politik, proses ini dinamakan sosialisasi primer yang mana merupakan langkah pertama dalam membentuk identitas seseorang. Proses peniruan terbagi menjadi dua yaitu peniruan pasif dan peniruan kreatif, jika peniruan pasif meniru dengan seutuhnya

2.3. Tinjauan Partisipasi

2.3.1. Pengertian Partisipasi

Kata Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Participation, Take A Part, artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi merupakan aspek penting demokrasi, oleh sebab itu banyak ara ahli mengemukakan pandangannya tentang partisipasi.

Menurut Midgley menjelaskan tentang partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya. Tuntutan partisipasi masyarakat akan semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Menurut Mikkelsen menyebutkan partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan suatu hal

2.3.2. Partisipasi Politik

Pengertian partisipasi politik sendiri mencakup pada penggabungan dua konsep dari sosialisasi dan politik. Sosialisasi politik merupakan aktivitas kegiatan yang didalamnya meliputi hubungan dengan kekuasaan dan kebijakan, kewenangan, pengambilan keputusan, kehidupan publik, baik itu pemerintahan, distribusi, negara ataupun konflik. Sementara itu jika dalam tahapan awal berlanjut dengan pengambilan bagian ataupun kontribusi dan berperan serta dalam kegiatan terkait dengan persoalan politik pemilihan kepala daerah seperti Partisipasi politik untuk meningkatkan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sehingga partisipasi melibatkan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik disebut partisipasi politik. Partisipasi politik juga dijelaskan oleh

Menurut Maran yaitu sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. partisipasi politik adalah sikap dari keterlibatan hasrat setiap individu dalam politik sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam tujuan pencapaian politik. Masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mengetahui masalah yang dihadapinya dan berusaha memecahkan masalah tersebut demi untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat Maka partisipasi politik

merupakan keterlibatan diri, mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dari berbagai macam level kegiatan politik diantaranya, kegiatan pemilihan pemimpin negara melalui pemilu sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab seseorang terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah.

2.3.3. Cara Meningkatkan Partisipasi

Adapun cara meningkatkan partisipasi adalah sebagai berikut:

1. mengikut sertakan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo daerah pemilihan umum kabupaten gorontalo
2. menjelaskan tentang maksud tujuan keputusan yang akan dikeluarkan kpu
3. meminta tanggapan dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan
4. langkah-langkah pelaksanaa pemilihan umum
5. memperkuat narasi solindaritas social.gotong royong dan empati masyarakat
6. Partisipasi merupakan dalam berbagi kegiatan koperasi baik yang menyangkut kewajiban maupun hak-hak masyarakat desa

Meningkatkan Partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah partisipasi masyarakat dalam pemilihan,khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemmipin kepala daerah dan siapa yang akan menjadi wakil kepala daerah merupakan indicator keberhasilan demokrasi.partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi

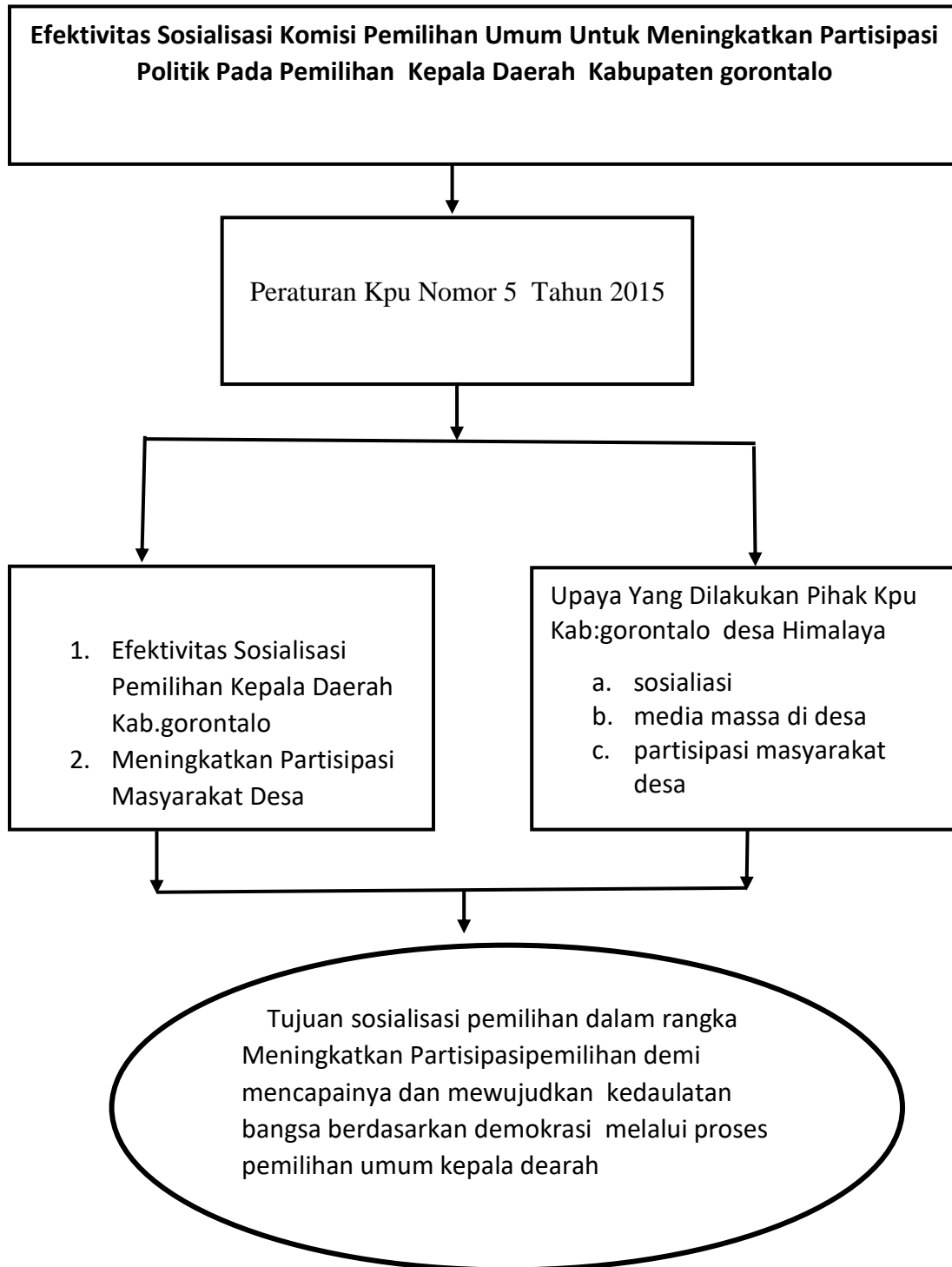
Langka-langkah melaksanakan pemilihan umum pada kepala daerah Tahapan Pemilu terdiri atas: a. sosialisasi,b. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan

peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu,c. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih,d. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Memperkuat narasi solindaritas sosialisasi komisi pemilihan kepala daerah gotong royong mempersiapkan untuk pemilihan kepala daerah kabupaten atau kota Masyarakat Partisipasi merupakan dalam berbagi kegiatan koperasi adalah merupakan keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan koperasi baik yang menyangkut kewajiban maupun hak-hak masyarakat untuk pemilihan kepala daerah kabupaten kota sebagai warnegara demokrasi Meminta Informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan.

Meningkatkan Partisipasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebab suatu cara yang dapatkan suatu harapan masyarakat untuk menyangkut pemilihan kepala daerah kabupaten kota

Apa yang dikemukakan tersebut hanyalah sebagian cara-cara untuk meningkatkan partisipasi, sebab masih banyak cara-cara lain untuk dapat meningkatkan partisipasi politik yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebab suatu cara yang tepat

3.4.karangka piker



Bagan kerangka berfikir diatas telah menunjukkan bagaimana alur pemikiran peneliti. Peneliti mengawali pemikiran dengan melihat masih rendahnya partisipasi masyarakat desa himalaya pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten gorontalo desa himalaya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana sosialisasi

Humas KPU kabupaten gorontalo sebagai pihak penyelenggara dalam hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada yang akan datang. Serta apa metode dan cara yang digunakan KPU sehingga pemilih lebih sadar akan pentingnya menggunakan hak suara mereka.

Hasil akhir yang akan dicapai adalah mengetahui secara jelas bagaimana sosialisasi humas KPU kabupaten gorontalo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo kasus di desa himalaya

2.5. Definisi Operasional

1. Efektivitas Pengukuran Keberhasilan Program Dalam Pencapaian Tujuanb-
Tujuan Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Tentukan Untuk Mencapai Sasaran
Dalam Suatu Kegiatan Umum yang sudah mencapai
2. Komisi Pemilihan Umum Adalah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten kota Berdasarkan Rumusan Undang-
Undang Kpu Yang Mengatur Tentang Pemilihan Umum untuk meningkatkan
partisipasi pemilu kabupaten gorontalo
3. Partisipasi Suatu Wujud Dari Peran Serta Masyarakat Dalam Aktivitas Berupakan
Perencanaan Dan Pelaksanaan Untuk Mencapai Tujuan dan harapan masyarakat
yang sudah sebelumnya sosialisasi kpu

4. Kpu limboto Sosialisasi Pemilihan Hal Yang Paling Kpu Harus Nya Sosialisasikan Dan Memberikan Harapan-Harapan Masyarakat Desa
5. Partisipasi Politik Adalah Bentuk Kegiatan Yang Kita Atau Warga Negara Ikut Serta Atau Lakukan Dalam Kegiatan Pengambilan Keputusan Secara Bersama untuk mencapai harapan kedepan
6. Peran Kpu Dalam Menyelenggarakan Pemilu,Bebas Dari Pengaruhi Pihak Mana Pun Berkaitan Dengan Pelaksanakan Tugas Dan Wewenangnya
7. Partisipasi Politik Berbagai Bentuk Kegiatan Politik Yang Ber tujuan Memengaruhi Pengambilan Keputusan Daripada Pemerintah.
8. Masyarakat Secara Perseorangan Harus Terlibat Dalam Pembuatan Keputusan Yang Penting Dalam Arti Memutuskan undang –undang kpu dalam mengatur tentang pemilihan DanKebijakan Umum.
9. Fact Finding (Mencari fakta) Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan beberapa informasi tentang pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten kota Setelah mendapatkan data maka dapat menjadi acuan untuk melaksanakan ke tahap yang berikutnya.
10. Sosialisasi suatu proses pembelajaran terhadap seseorang agar memahami dan memiliki kesadaran peran dengan tepat di dalam masyarakat.
11. Sosialisasi Pemilu adalah suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut undang-undang dan ketentuan berlaku

dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala daerah kabupaten kota

Efektivitas sosialisasi pemilu menjadi variable dalam penelitian ini. Artinya penelitian ini mengukur efektivitas sosialisasi pemilu berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana, prasarana, integrasi dan pencapaian tujuan pada efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di komisi pemilihan umum kpu Kabupaten gorontalo

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan .kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan,yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian mengenai Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten gorontalo Desa Himalaya, selain itu.untuk menganalisis nya menggunakan analisis data kualitatif yang prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan pengamatan

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tentang hal objetif,valid,dan realiable tentan suatu hal (variable tertentu),

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan inplementasi komisi pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi politik pada kepala daerah kabupaten gorontalo desa Himalaya

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian berupa penelitian lapangan (field research) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan secara intensif dengan turun langsung ke lokasi untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan tema penelitan yang sudah ada dalam judul efektivitas sosialisasi komisi pemilihan unum untuk pada meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala

daerah kabupaten gorontalo desa Himalaya sedangkan waktu penelitian kurang lebih satu bulan yaitu bulan 05 agustus 2022 sampai 26 september 2022

3.4. Populasi Dan Sampel

3.4.1. populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau penelitian. sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh populasi.

Sehingga menjadi dapat dikatakan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah:

1. KPU kabupaten gorontalo sosialisasi melibatkan masyarakat desa Himalaya
2. komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo sebagai peranan hukum wilayah gorontalo untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan KPU

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut adapun pendekatan dalam metode pemilihan *sample* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*.

1. Sampel sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi
2. sampel sebagian atau wakil populasi yang diteliti

3.5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.
2. Data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data . Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, jurnal, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana pemberi pelayanan

Dalam hal ini seperangkat organisasi kepengurusan lembaga dapat memberikan informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya.

- b. Dokumentasi

Sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan serta keuntungan, dan lain sebagainya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan Data adalah sebagai berikut

- a. Wawancara, yaitu Tanya jawab secara langsung yang di anggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.

- b. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3.7. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan efektivitas sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Komisi pemilihan umum KPU Kabupaten Gorontalo desa Himalaya

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yang dimaksudnya mendeskripsikan data yang diperoleh tentang Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Gorontalo meningkatkan partisipasi politik di Desa Himal

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian efektivitas sosialisasi meningkatkan partisipasi politik kpu kabupaten gorontalo desa himalaya dan tempat penelitian merupakan himalaya Hasil Pemekaran dari Desa induk yakni desa sidoharjo yang berada diwilayah Kecamatan Tolangohula. Desa himalaya adalah desa mekaran dari desa sidoharjo pada tahun 2011. Pada awal pemekaran Desa himalaya terdiri dari 2 (dua) Dusun yakni Dusun poheita, Dusun Himalaya Yang Pada Saat Itu Di Pimpin Oleh Seorang Kepala Desa Bapak GAFAR D.RADJANUN. Beliau memerintah desa Himalaya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. dan desa himalaya berhasil memekarkan dusun yang awalnya Cuma 2 dusun (dua) sudah menjadi 2 (dua) dusun yakni dusun bongohulawa ,dusun bulangita,. Pada masa pemerintahan Bapak Gafar D RadjanunDesa himalaya mengalami Kemajuan dari Segala Bidang.Pada akhir pemerintahan Bapak Gafar D Radjanun yang tepatnya pada akhir tahun 2016. Desa himalaya kembali melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang pada saat itu berhasil dimenangkan kembali oleh Bapak Gafar D Radjanun 2016 sampai dengan sekarang atas tahun 2023

4.1.1.Komisi Pemilihan Umum Kpu Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Melalui Sosialisasi.

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang

sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.

Negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan rakyat di tangan rakyat, namun dalam demokrasi tidak semua rakyat benar-benar terlibat langsung dalam melaksanakan pemerintahan, rakyat hanya terlibat langsung dalam pemilihan umum yang nantinya menentukan mewakili-wakilnya dalam pemerintahan.

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilihan umum kabupaten kota yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilihan umum kepala daerah kabupaten limboto yang berkualitas.

Partisipasi Politik

Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik (Dam)

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di Negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (dalam Miriam Budiharjo,

Pemilihan umum kepala daerah adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga, pemilihan umum penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada

fase tersebut Huntington menyebut pemilihan sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangny penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu. (Ranadireksa).

Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilihan umum. Pada saat pemilihan umum rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilihan umum, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu. Intinya, pemilihan umum adalah suatu contoh partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakilwakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sangat bermaknanya pemilu bagi semua orang, maka pemilihan yang menjadi indikator demokratisnya suatu negara.

Berangkat dari batasan pengertian partisipasi politik dalam pemilihan umum tersebut. Pada akhirnya penelitian ini juga tidak bisa menafikan karakteristik sosial yang terjadi dalam objek penelitian, terkhusus Garut. Sebab pada akhirnya peneliti juga harus bisa mengiyakan ada faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik ini. Studi hasil penelitian Seymour Martin Lipset, dalam *Political Man: the Social Bases of Politics*) dalam Miriam Budihardjo) menegaskan dengan sangat terang bahwasanya karakteristik sosial berpengaruh terhadap partisipasi politik. Karakteristik sosial tersebut meliputi

pendapatan pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi kondisi, status dan organisasi. Dengan demikian karakteristik sosial khas kegarutan, menjadi bumbu pelengkap dalam pembahasan penelitian ini.

Dasar hukum Nomor 5 Tahun 15

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pemilihan kepala daerah kabupaten kota

bagian kesatu wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pemilihan pasal 16

1. dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, kpu provinsi kabupaten kota dan kpu kabupaten/kota berwenang berwenang: a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemilihan; b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan c. menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi kpu provinsi /kabupaten kota dan komisi pemilihan umum kpu kabupaten/kota, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, kpu kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab: a. memberikan informasi sesuai peraturan perundangundangan; b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan; dan c. mendorong partisipasi masyarakat.
4. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten kota .

5. wewenang kpu provinsi dan kpu kabupaten gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

sebagaimana diamanatkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

keberadaan kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22e undang-undang dasar 1945 juga telah memiliki undangundang tersendiri yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten gorontalo yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan ketiga yaitu periode 2013 – 2018 setelah sebelumnya periode kedua 2008 – 2013 dan periode pertama

berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pasal 10 telah diatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban kpu kabupaten gorontalo untuk lebih mengefektifkan kerja kpu kabupaten gorontalo provinsi gorontalo, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Sosialisasi dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan harapan semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat pada umumnya, yaitu terlaksananya pemilihan yang lancar, bersih, aman, dan demokratis, maka pengetahuan dan informasi masyarakat tentang apa dan bagaimana pemilihan kepala daerah kabupaten Gorontalo perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang intensif.

Kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi dan pendidikan pemilihan merupakan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo beserta jajarannya yang dilakukan bersama-sama dengan segenap pemangku kepentingan dalam berbagai macam bentuk kegiatan, sesuai tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Gorontalo. Kegiatan sosialisasi dimulai oleh KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 29 November 2012 saat launching tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten Gorontalo. Kegiatan sosialisasi diikuti dengan memperkenalkan jingle dan maskot pemilihan kepala daerah kabupaten Gorontalo di halaman Kantor KPU Gorontalo. Kegiatan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dibagi dalam 2 macam kegiatan yaitu penerangan dan penyuluhan. Kegiatan yang termasuk dalam penerangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo melakukan penggandaan materi sosialisasi yang meliputi produk-produk hukum dari KPU dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo serta peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Gorontalo.

Untuk memudahkan penyelenggaraan sosialisasi di tiap-tiap wilayah kecamatan dan kelurahan se-kabupaten gorontalo, komisi pemilihan umum KPU kabupaten gorontalo melakukan sosialisasi dan memberikan materi sosialisasi kepada PPK dan PPS di kecamatan masing-masing dan juga kabupaten gorontalo desa himalaya, kemudian mengintruksikan agar PPK dan PPS juga melakukan sosialisasi di wilayah kecamatan dan kelurahannya masing-masing. Kegiatan sosialisasi ini menekankan pada tema pendaftaran pemilih, dan tema partisipasi (ajakan tidak golput) serta tema pemugutan suara.

Penyuluhan melalui media elektronik dan beberapa kegiatan antara lain penyiaran jingle pilkada kabupaten gorontalo, iklan tentang pendaftaran pemilih dan informasi tentang pemungutan suara, dalam hal ini disiarkan melalui media televisi lokal, dan stasiun radio di kabupaten gorontalo

Penyuluhan melalui media massa/koran yaitu dalam bentuk iklan, pengumuman dan pemberitaan kegiatan KPU kabupaten gorontalo, di media massa lokal kabupaten gorontalo

Kemudian dalam upaya penyebar luasan informasi ke masyarakat desa jangkauan di antaranya desa himalaya, KPU komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka dengan berbagai kalangan di masyarakat desa himalaya dengan harapan bisa dijadikan penyampaian informasi seputar pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo kepala daerah dan wakil kabupaten gorontalo kepada masyarakat dalam kelompoknya masing-masing, cara ini sudah dilakukan juga pada waktu pemilu 2009 dan pilkada kabupaten gorontalo 2010, sehingga pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo desa

himalaya Tahun 2013 dijadikan salah satu strategi dalam menyebarluaskan informasi pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo .

Sesuai dengan yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 11 tahun 2010, bahwa salah satu kelompok sasaran sosialisasi adalah pemilih dengan kebutuhan khusus (misalnya penyandang cacat).komisi pemilihan umum (kpu) juga menjalin kerjasama dengan lembaga yang mewadahi penyandang cacat di kabupaten gorontalo didesa himalaya, untuk bersamasama melakukan sosialisasi disamping itu, komisi pemilihan umum (kpu)kabupaten gorontalo juga menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk bersamasama mengadakan sosialisasi kepada masyarakat desa himalaya agar lebih efektif dalam penyelenggaraannya, maka kelompok sasaran yang dituju adalah kelompok yang belum tersentuh pada kegiatan yang lainnya.

Adapun kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan kpu kabupaten gorontalo antara lain adalaa

a. Sosialisasi tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih

sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pemuktakhiran data dan daftar pemilih pimilihan kepala daerah kabupaten gorontalo desa himlaya, setelah menerima DP4 dari pemerintah kabupaten gorontalo, komisi pemilihan umum kpu di dalam melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih (DP) dibantu oleh pps dan PPK, disamping itu, agar proses pemutakhiran berjalan dengan baik lancar, KPU kabupaten gorontalo mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPK, selanjutnya ppk memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pps.

berdasarkan hasil wawancara dengan ibu selaku sekrataris desa himalaya

sosialisasi tentang pemuktakhiran data dan daftar, pps memberikan sosialisasi kepada ketua rt yang merupakan ppdp, sosialisasi ini berfungsi untuk mempermudah pencocokan dan penelitian di tingkat rt, karena ketua rt diharapkan benar-benar dapat memberikan masukan nama-nama penduduk yang berada di wilayah rt nya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum untuk pemilihan umum kepala daerah kabupaten gorontalo.

berdasarkan hasil wawancara dengan mimin ladikuselaku pemerintah desa himalaya dalam sosialisasi tentang pemuktakhiran data dan daftar pemilih, ppdp yang merupakan bagian yang utuh dari kpu menyusun agenda kerjanya untuk menjumpai satu persatu kerumah pemilih yang mudah dijumpai dan lengkap secara administrasi. mengembangkan program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo

pemutakhiran data pemilih adalah rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (pps) dibantu petugas pemutakhiran data pemilih (ppdp) dalam rangka penyusunan daftar pemilih sementara (dps) kpu kabupaten gorontalo , data pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten gorontalo desa himalaya daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan daftar pemilih tetap (dpt). kegiatan pemutakhiran ini dalam pemilu DPR, DPD, DPRD dan pemilu presiden tahun 2009 telah menjadi pemberitaan yang heboh, dimana para peserta pemilu telah melakukan protes keras kepada kpu dan kpu kabupaten gorontalo

HASIL PENELITIAN

4.2.PeranKpu Efektivitas Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Melalui Sosialisasi.

a. Narasumber ibu sekretaris desa himalaya

Berdasarkan desa himalaya 4 dusun dan penduduk desa himalaya narasumber dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu: narasumber dengan . Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk kategori tersebut.

Tabel 4.1 Narasumber berdasarkan jenis peningatan desa himalaya kabupaten gorontalo

no	Penduduk desa himalaya	Frekuensi	Persentase
1	himalaya	46	40%.
2	poheita	24	20%.
3	bonggohulawa	28	20%.
4	bulangita	25	20%.
	Jumlah		1023

Sumber: Data Wawancara

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari penduduk desa himalaya efektivitas meningkatkan masyarakat desa himlaya dengan frekuensi sebanyak dengan persentase 1023%.

b.Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut di desa himalaya dapat dikelompokkan, menjadi 4 dusun kelompok yaitu narasumber dengan Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1 Narasumber berdasarkan TPS desa himalaya kabupaten gorontalo 3 (tiga)

TPS desa himalaya Sumber: Data Wawancara

no	Tps desa himalaya	Frekuensi	persentase
----	-------------------	-----------	------------

1	Tps	241	35%.
2	Tps	241	420%.
3	Tps	243	40%.
	jumlah	Pemilih	725

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat dari tps yang ikut pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo desa himalaya dengan frekuensi sebanyak dengan persentase 725% sedangkan dari dari hak pemilihan kepala daerah dengan frekuensi sebanyak dengan persentase 100%.

b. Narasumber Menurut peningatan masyarakat desa himalaya

Berdasarkan efektivitas partisipasi masyarakat desa himalaya , narasumber dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: narasumber dengan selaku pelayanan dan kesra Sosialisasi,desa himalaya ,kabupaten gorontalo desa himalaya.Pada tabel 4.2.berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

NO	Peningatan	Frekuensi	Persentase
1	efektivitas Sosialisasi tingkat desa himalaya	baik	40%
2	Partisipasi masyarakat desa himalaya	baik	40%
3	Peningatan Masyarakat desa hilmaya	baik	60%
jumlah			100%

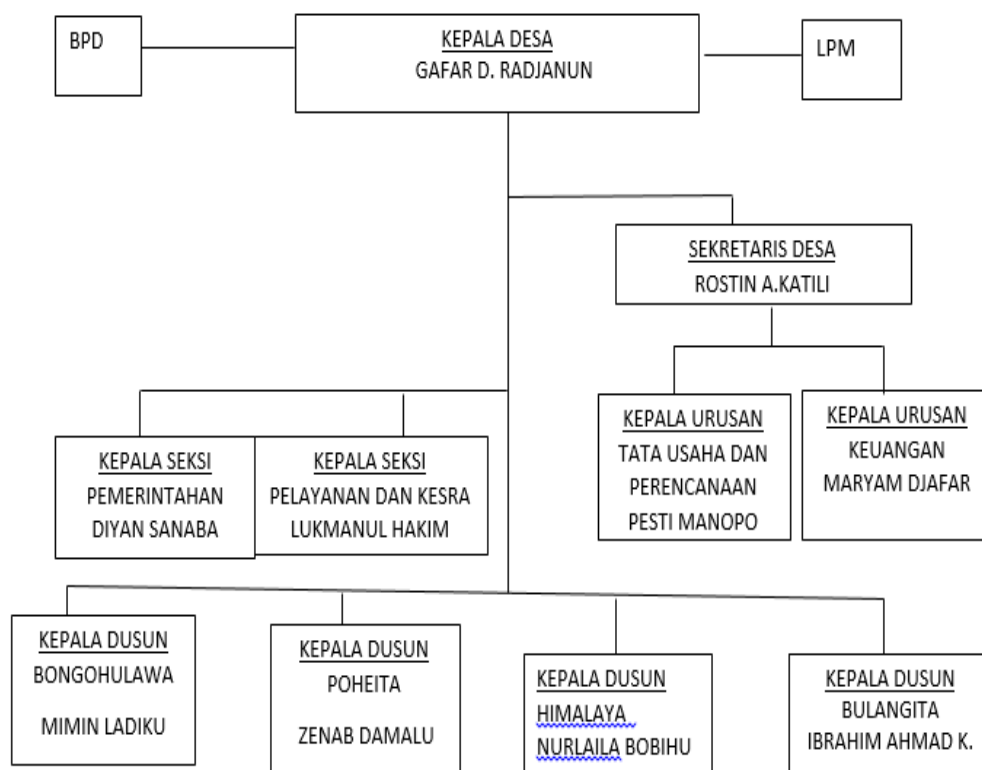
Sumber: Data Wawancara

Tabel 4.2 Narasumber berdasarkan peningatan partisipasi masyarakat desa himalaya

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber yang berasal dari desa himalaya andanya kepala desa dan aparatur desa himalaya kabupaten gorontalo d.Narasumber Menurut strukruktur pemerintah desa himalaya

Berdasarkan tingkat pemerintahan desa narasumber dikelompokan menjadi satu yaitu Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk kategori tersebut.

Tabel 4.2 Narasumber berdasarkan Strutrutur



Sumber: Data Wawancara

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari tingkat pemerintahan desa himalaya dengan frekuensi sebanyak dengan persentase

4.2. HASIL PEMBAHASAN

Efektifitas meningkatkan partisipasi masyarakat desa Dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sosialisasi politik merupakan salah satu tahapan penting sehingga prosesnya tidak bisa dikesampingkan oleh penyelenggara Pemilu. Banyak kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa proses sosialisasi politik yang tidak berjalan dengan baik telah menimbulkan dampak terhadap jalannya Pemilu yang tidak sesuai dengan harapan, sebagai contohnya adalah minimnya partisipasi politik masyarakat desa himalaya sehingga pemilihan kepala daerah meningkatkan partisipasi lebih khusus masyarakat himalaya dalam Pilkada kabupaten gorontalo disinyalir oleh sebagian disebabkan oleh minimnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten kota gorontalo desa himalaya .

Sosialisasi politik Pemilu merupakan hal yang sangat penting di saat sebagian masyarakat masih mempertanyakan tentang pentingnya Pemilu bagi mereka, terlebih disaat banyak masyarakat merasa pesimis bahwa Pemilu dapat membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah munculnya pesimisme masyarakat soal Pemilu maka sosialisasi Pemilu menjadi penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dan tentang urgensi Pemilu tersebut sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggung jawab.

Terkait dengan pentingnya sosialisasi politik dalam Pemilu pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo , seorang informan dari pps desa himalaya Komisi pemilihan

umum KPU mengungkapkan bahwa dengan adanya sosialisasi politik diharapkan semua masyarakat Indonesia atau masyarakat desa Himalaya dapat terlibat dalam Pemilihan umum kabupaten Gorontalo sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses.

Dari apa yang telah diungkapkan PPS Desa, KPU/komisi pemilihan umum sendiri mengharapkan pesta demokrasi lima tahunan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat desa Himalaya yang memiliki hak pilih, sehingga perwujudan demokrasi yang disalurkan melalui Pemilu benar-benar dapat terlaksana. Namun demikian proses sosialisasi yang dilakukan tentunya tidak sebatas mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan umum kepala daerah kabupaten Gorontalo.

Pentingnya menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu juga disosialisasikan oleh KPU, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah (KPU), sebab proses Pemilu seringkali disuguhkan oleh adanya persaingan politik yang tidak sehat ketika memasuki masa kampanye.

Beredarnya kampanye hitam atau yang lebih dikenal dengan black campaign merupakan hal yang berbahaya sebab black campaign cenderung menyudutkan atau menyerang lawan politik tanpa disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memicu konflik politik, terutama di tingkat bawah (grass root). Dengan adanya sosialisasi politik diharapkan dapat menekan atau meminimalisir terjadinya konflik politik, sejauh masyarakat diberi pemahaman yang sangat jelas tentang bahaya black campaign bagi stabilitas keamanan, ketertiban dan kelancaran Pemilu.

Adapun komisioner pps desa himalaya, lukmanul sanamba, mengungkapkan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan kpu tidak hanya mencoba untuk mengajak masyarakat untuk ikut memberikan suara tetapi juga bagaimana agar masyarakat turut serta menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu dengan tidak turut mendukung dan mengindahkan kampanye hitam. Selama ini menurut Ferry bahwa kemajuan teknologi seperti SMS dan BBM rentan disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak tepat terhadap partai politik atau kandidat politik tertentu, dan masyarakat seringkali dengan mudahnya kemudian menyebarkan informasi tersebut, baik melalui broadcast message ataupun SMS berantai.

Apa yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum dalam mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu dengan tidak mengindahkan dan mendukung kampanye hitam merupakan salah satu langkah tepat, sebab sosialisasi politik tidak hanya terkait dengan bagaimana mengajak masyarakat untuk memilih tetapi juga bagaimana masyarakat dapat menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Pandangan ini sesuai dengan Wright (dalam Sutaryo, 2005) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi politik juga terkait dengan bagaimana seseorang menginternalisasikan norma-norma sosialnya, serta pandangan Greenstein (dalam Rush dan Althoff, 2008) yang mendefinisikan bahwa sosialisasi secara sempit adalah penanaman informasi dan nilai-nilai politik.

4.2.1. Efektivitas Sosialisasi Politik dalam Pemilihan kepala daerah

Sebelum pemilihan umum kepala daerah kabupaten gorontalo tahun 2014 dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu mencapai angka dengan Angka sebelumnya dari KPU tersebut terbilang cukup tinggi

apabila mengacu pada rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pps desa himalaya lukmanul diketahui bahwa hasil Pemilu tahun lalu sangat sayangkan dengan tahun-tahun sekarang ini partisipasi pemilih mencapai cukup tinggi Untuk mengejar target % angka partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan umum kepala daerah kabupaten kota sebelumnya maka menurut informan dari ketua pps desa himalaya, lukmanul aKpu gencar melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan, dengan masuk ke berbagai kalangan masyarakat , sekolah, kelompok tani, rumah sakit, dan kelompok masyarakat lainnya. Sosialisasi tersebut diyakini oleh informan dapat menekan angka Golput yang dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya masih tergolong cukup tinggi, yakni sebesar yang di inginkan komisi pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo.

Mengacu kepada fenomena Golput yang terus terjadi dari setiap Pemilu maka diperlukan perjuangan ekstra oleh KPU untuk mewujudkan targetnya, sebab Golput salah satunya muncul karena kekecewaan masyarakat terhadap peserta Pemilu, dan tugas KPU adalah meyakinkan masyarakat tentang pentingnya Pemilu dalam sistem politik demokrasi dengan tetap menjadikan masyarakat sebagai pemilih yang kritis dan cerdas.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU untuk angka yang mengejar targetkan partisipasi pemilih menjadi tidak sia-sia, sebab berdasarkan hasil perhitungan real yang telah dirampungkan oleh KPU dari hasil pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo 9 April 2014 tercatat partisipasi masyarakat berada pada angka dengan jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya sebesar jiwa. Apabila mengacu

pada ketercapaian angka ini tentunya pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2014 dapat dikatakan lebih sukses dibandingkan dengan dua Pemilu sebelumnya (2004 dan 2009), kondisi ini terlihat dari keberhasilan KPU mencapai targetnya untuk mendorong partisipasi politik minimal sebesar yang bahkan sedikit melebihi angka yang target, serta berhasilnya KPU komisi pemilihan umum kabupaten Gorontalo menekan angka Golput ditengah-tengah meningkatnya apatisisme politik masyarakat sebelum proses Pemilu dimulai.

komisioner pps desa Himalaya dari Care Institute menilai apa yang ditorehkan oleh KPU saat ini bukan suatu hal yang luar biasa, mengingat masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika proses kampanye, pemilihan, maupun perhitungan suara. Sosialisasi Pemilihan umum yang dilakukan KPU dinilai masih sebatas bagaimana mengajak masyarakat datang ke TPS dengan tujuan menekan angka golput dan memberikan pendidikan bagaimana cara memilih, sedangkan sosialisasi pemilihan lainnya seperti bagaimana masyarakat menghindari money politics dan black campaign belum terlalu fokus.

Apa yang diungkapkan oleh Lukmanul Sanamba menurut merupakan suatu hal yang tidak sepenuhnya salah sebab peneliti pun melihat masih banyak pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai politik atau calon legislatif dari partai tertentu, sebagai contohnya adalah ditemukannya aktivitas politik uang dengan cara menyebarkan uang pada saat kampanye maupun sebelum waktu pencoblosan. Selain persoalan politik uang peneliti juga melihat adanya permasalahan lain seperti masih beredarnya black campaign ataupun sindiran politik yang meluas di masyarakat, sebagai contohnya serangan politik kotor yang diarahkan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

dengan munculnya spanduk Lawan PKS atau yang diartikan Partai Korupsi Sapi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam melakukan sosialisasi, namun demikian secara keseluruhan proses sosialisasi politik yang dilakukan KPU dalam Pemilihan umum kepala daerah kabupaten gorontalo ini dapat dikatakan berhasil dan cukup efektif dan baik

4.2.2 Kasus Efektivitas Sosialisasi Desa Himalaya

Kasus Efektivitas Sosialisasi Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten gorontalo Di Desa Himalaya kabupaten gorontalo tahun

kasus yang terjadi karena faktor komisi pemilihan umum kpu kabupaten gorontalo di desa himalaya, karena adanya Kendala kpu yang sosialisasi dan memperluas informasi pemilihan kepala daerah kabupaten kota merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan di desa himalaya baik, dengan begitu akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Kpu Kabupaten gorontalo dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa himalaya pada Tahun mendapatkan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan. efektivitas sosialisasi Kendala tersebut sebagai berikut.

1. Kurangnya efektifitas sosialisasi di desa himalaya

efektivitas partisipasi dalam pemilihan kepala daerah melalui Sosialisasi merupakan bagian yang sangat penting karena dari tahapan inilah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten gorontalo dapat merumuskan tindakan yang akan dilakukan serta pola-pola apa saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan kpu kabupaten gorontalo .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ikmanul selaku pemerintahan desa himalaya kabupaten gorontalo

komisi pemilihan umum dalam tahapan ini mendapatkan kendala seperti anggaran sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah masih belum seimbang dengan jumlah penduduk serta luas wilayah kabupaten gorontalo termasuk di desa himalaya sehingga pada tahapan formulasi program sosialisasi KPU belum mengkaver secara keseluruhan tindakan yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo, tetapi KPU hanya memilih beberapa alternatif tindakan yang dianggap paling penting. Dari kendala ini maka sangat penting bagi partisipasi masyarakat dan Pemerintah untuk memperhatikan mengenai kesiapan finansial dalam hal mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo selanjutnya.

Anggaran untuk melakukan sosialisasi harus sesuai dengan jumlah penduduk agar dapat mendukung kegiatan sosialisasi yang dianggap sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah kabupaten gorontalo tahun

2. . Kurangnya respon dari KPU dalam hal sosialisasi meningkatkan partisipasi masyarakat desa himalaya

Salah satu kendala yang dihadapi oleh KPU dalam melaksanakan sosialisasi adalah kurangnya respon masyarakat di saat akan atau saat dilaksanakan sosialisasi, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Miminladiku selaku masyarakat desa himalaya termasuk kades desa himalaya Kurangnya pemberitahuan adanya sosialisasi dari KPU kepada masyarakat desa himalaya mengenai pemilihan kepala daerah kabupaten

gorontalo bahwa kurangnya pemberitahuan adanya sosialisasi menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap kami di desa himalaya .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lukmanul sanamba selaku pelayanan dan kesra pemerintahan desa himalaya dan termasuk desa himalaya masyarakat Mengatkan bahwa sebelum sosialisasi yang dilakukan kpu hendaknya kpu melakukan pemberitahuan kepada masyarakat melalui iklan dan baliho agar masyarakat lebih mudah mengetahui adanya sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak lukamanul juga ditambahkan

Dalam sosialisasi tersebut Kpu mendapatkan kendala yang menjadi penghambat lancarnya kegiatan tersebut seperti kurangnya respon masyarakat terhadap pelaksanaan pemilukada, hal tersebut dilihat dari minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kpu. Dari kendala tersebut dapat Wawancara dengan masyarakat memberikan gambaran bahwa masyarakat desa himalaya belum secara keseluruhan sadar akan pentingnya pemilihan umum kepala daerah kabupaten gorontalo sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah kabupaten gorontalo untuk mendorong respon masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilukada.

a.berdasarkan penelitiannya di desa himalaya kabupaten gorontalo sesuai dengan judul di atas maka pedapat atau

Menurut analisis penulis kendala Komisi Pemilihan Umum kpu kabupaten gorontalo dalam melakukan sosialisasi politik pemilihan kepala daerah gorontalo sangat baik sesuai dengan peraturan kpu bersama pemerintah kabupaten gorontalo namun ,ada

sedikit yang kejanggalan partisipasi tingkat desa himalaya perlu nya sosialisasi penting nya pemilihan kepala daerah kabupaten kota pada masyarakat pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo untuk di desa himalaya antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi yaitu berupa anggaran sosialisasi yang disediakan pemerintah belum seimbang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten gorontalo desa himalaya.
2. Kurangnya respon dari KPU kabupaten gorontalo untuk sosialisasi tingkat desa dalam efektivitas partisipasi desa himalaya masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dari komisi pemilihan umum kepala daerah kabupaten gorontalo

Menurut analisis penulis efektivitas Komisi pemilihan umum dalam sosialisasi pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo adalah dengan diadakan nya banyak kegiatan sosialisasi guna menunjang keberhasilan pemilu itu sendiri, khususnya untuk menekankan angka golput dan memberikan semacam penanaman nilai dan norma social sehingga bisa meminimalisir black campaign melalui berbagai bentuk sosialisasi sesuai dengan undang-undang yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum kabupaten gorontalo, efektivitas dari sosialisasi tersebut dibuktikan pada pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo ada yang kejanggalan efektivitas sosialisasi meningkatkan partisipasi pemilihan yang di desa himalaya sebesar 725% dari 1023 keseluruhan perolehan suara, artinya hasil pemilihan dan memiliki kepala daerah kabupaten gorontalo yang kuat ini membuktikan bahwa hasil sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum kabupaten gorontalo berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa himalaya

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

efektivitas Sosialisasi dalam partisipasi politik pemilihan kepala daerah dalam Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan Pemilu atau pemilihan kepala daerah itu sendiri, khususnya untuk menekan angka golput dan memberikan semacam penanaman nilai atau norma sosial sehingga bisa meminimalisir black campaign. Proses sosialisasi politik Pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo oleh KPU /komisi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan dengan cara mendatangi beberapa desa , sekolah, maupun kelompok masyarakat tertentu dinilai efektif sebab mampu menekan angka golput disaat muncul kekhawatiran akan semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang menimpa kader partai. Hasil Pemilihan yang menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam Pemilihan adalah menjadi bukti bahwa kpu telah berhasil mencapai targetnya dalam menekan angka golput, dan ini menunjukkan ada perbaikan kinerja Kpu komisi pemilihan umum dibandingkan dengan periode Pemilu sebelumnya. Efektifnya proses sosialisasi politik yang dilakukan Kpu diharapkan tidak berhenti hanya pada periode Pemilu tahun ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kpu sebab masih ada permasalahan lain yang juga tidak kalah penting dalam proses sosialisasi politik, diantaranya menekan terjadinya politik uang dan kampanye hitam. Kedepan kpu harus lebih intens dalam mensosialisasikan Pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo yang bersih disamping dengan terus berupaya meminimalisir angka golput yang masih cukup besar

Pada dasarnya masyarakat di kabupaten gorontalo telah menjalankan nilai-nilai dari partisipasi politik. Dimana ikut aktif dalam kegiatan pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo . Ikut aktif dalam kegiatan memilih dan dipilih tapi dalam pelaksanaannya masih kurang tepat karena masih adanya kegiatan mobilisasi politik. Oleh karena itu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat di desa himalaya perlu diperbaiki agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai partisipasi politik yang baik dan benar.

5.2.Saran

1. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan saran kepada komisi pemilihan umum (kpu) sesuai dengan fenomena yang peneliti dapatkan di lihat dari desa himalaya tempat penelitian efektivitas partisipasi tingkat desa himalaya atau masyarakat dilapangan agar Dalam melaksanakan sosialisasi hendaknya kpu kabupaten gorontalo perlu memberikan pemberitahuan dan pengumuman ditempat yang strategis dan dapat dilihat oleh masyarakat agar masyarakat desa himalaya dapat mengetahui adanya efektivitas sosialisasi. a Dan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten gorontalo kami menyarankan agar kendala yang di alami Komisi Pemilihan Umum kabupaten gorontalo didesa himalaya cepat di selesaikan. Efektifitas sosialisasi yang dilakukan komisi pemilihan umum sudah bagus tetapi penulis mengharapkan peningkatan perolehan suara setiap pemilihan kepala daerah kabupaten gorontalo perlu memberikan logistic. bagi masyarakat desa himalaya kabupaten gorontalo ,karena peneliti di hati dari jaraknya jauh dan termasuk desa jangkauan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad surkati,**”otonomi daerah sebagai intrumen pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan kerjasama antar daerah”,hasil penelitian kompentitif universitas sultan ageng tirtayasa(2012)
- Andi Muhammad Gian Gilland, “Tinjauan Yuridis pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makasar 2013
- Sirajul Munir, “Peran komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat (analisi dalam pemilihan kepala daerah dikabupaten Sumenep tahun 2015)”, hasil penelitian kompentitif UIN sunan kalijaga Yogyakarta,(2016).
- Djuyandi, Yusa. 2014. Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. E.Journal HUMANIORA, Vol.5, No.2 Oktober 2014: 1202-1212
- Sunarto, Kamanto. 2000. Pengantar Sosiologi. Jakarta:LPES. Sutrisno, Edy.2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT.Gramedia: Jakarta. Subanda, Nyoman. 2009. Analisis kritis terhadap phenomena golput dalam pemilu. Jurnal Konstitusi Vol. 11 No.1 Juni 2009.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjokrowinoto, Moerlianto. 1995. Politik Pembangunan. Yogyakarta: Tiara
- Wicana. Tilaar, 1997. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi. Jakarta: Gramedia.

Yuniarsih, Tjutju, dan Suwatno. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian, Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat.

Nurmianto, Eko. 2003. Ergonomi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Surabaya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Maslekeh Pratama Putri, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur,” Ejournal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, No. 1, (2016).

HM.thalhah,”teori demoksrasi dalam wacana ketatanegaraan persektif pemikiran hanskelsen,”jurna lhukum,vol. 16. No.3, (juli 2009)

Jailani,S.H., M.H. ,”sistem demokrasi di indonesia ditinjau dari sudut hukum ketatanegaraan, Jurnal Inovatif, Vol. VIII No. I (Januari 2015),

Natal kristiono,”buku ajar otonomi daerah “,hasil penelitian kompentitif universitas negeri semarang(2015)

Rudi samosir,”pengaruh sosialisasi media ruang KPU pematang siantar terhadap minat kelompok pemilu pada pemilu legislatif 2014” ,hasil penelitian kompentitif(2014)

Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014).

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 3(2), 14–28.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/viewFile/17190/16738>

Mitchell, B. (2015). Participatory Partnerships: Engaging and Empowering to Enhance Environmental Management and Quality of Life. *Social Indicators Research*, 71, 123– 144.

Moelong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi, cetakan xxv). Bnadung: PT Remaja Rosdakarya. Liberty, Yogyakarta.

Muhaling, Arther. (2014). "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro". (Skripsi) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado. Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/48739/2/Bab_I.pdf 28 November 2016, pukul 14:23 WITA.

Nopyandri. (2012). Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).

Rahmatunnisa, M. (2017). Permasalahan Anggaran Pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 79–44.

<https://gorontalo.kota.go.id/new/sejarah-kota-ulandalo/>, di Akses pada 12 September 2018

<http://kpu-hulandalo.limboto.go.id>



Gambar 1. Ruang Tamu kantor kpu gorontalo
Dengan Ibu Rosntin A. Katili anggota kpu gorontalo

Gambar 2

.Depan Kantor kpu komisioner gorontalodengan ibu,, staf kpu kota gorantaLO



Gambar 3

Sedang Wawamcara Dengan Lukmanul Hakim Harun
kepala seksi pelayanan dan kesra di kantor kpu kabupaten gorontalo





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo L.L.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4414/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Himulaya

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ascer Murib

NIM : H1116096

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DESA HIMULAYA

Judul Penelitian : EFEKTIVITAS SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LIMBOTO
KECAMATAN TOLANGGOHULA DESA HIMULAYA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



16 November 2022

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4414/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022
Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Himulaya

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Aser Murib
NIM : H1116096
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : DESA HIMULAYA
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LIMBOTO
KECAMATAN TOLANGGOHULA DESA HIMULAYA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 10 November 2022

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN TOLANGOHULA
DESA HIMALAYA
Jln. Sebelas - Bulangita Desa Himalaya Kode Pos 96222

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 474/DH-K.Tol/314/XI/2022

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Adalah Kepala Desa Himalaya.

Menerangkan Bawah Mahasiswa Fakultas Hukum Inuversitas Ichsan Gorontalo :

Nama : Aser Murib
Nim : H1116096
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Benar-Benar telah Melakukan Penelitian Mulai Dari Tanggal 21-30 November 2022 Di Desa Himalaya Kecamatan Tolangohula Untuk Menyusun Skripsi Dengan Judul : Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Limboto Kecamatan Tolangohula Desa Himalaya

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat ,Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Himalaya, November 2022
Kepala Desa Himalaya





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 025/FH-UIG/S-BP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Aser Murib
NIM : H.11.16.096
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Limboto Kecamatan Tolanggola Desa Himalaya (Studi Kasus Efektivitas Sosialisasi KPU Pemilihan Kepala Daerah)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 11 Mei 2023

Tim Verifikasi,

SAMARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama: Aser Murib

Nim: H1116096

Jenis Kelamin : laki-laki

status perkawinan : kawin

Tempat Tanggal Lahir : Mugi 03-01-1997

Fakultas : Hukum

Program Studi : ilmu hokum

kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen /protesan

Alamat : Yaba Kab.Nduga Provinsi Papua

Alamat Sekarang : Jln Ujung Bali Kota Tenggara Gorontalo

No Hp : 081240212799

Email : muribaser3@gmail.com

Nama Orang Tua

-Ayah : Dilo Murib

-Ibu: Perkwe Un Kogoya

Saudara:

Kakak : 4 orang laki-laki

Adik : 1 orang perempuan

Istri (2) : Ida Tabuni Dan : S,S.Ayu Murib &S



Riwayat Pendidikan:

No	Tahun	Jenjang Pendidikan	Tempat Sekolah	Ket
1	2009	Sdn Nduga /Prov Papua	Mugi /Kab.Nduga Prov.Papua	Berijasah
2	2012	Smp Yaois Wamena	Wamena /Papua	Berijasah
3	2015	Sma Yppk St.Thomas Wmn	Wemena /Papua	Berijasah
4	2023	Fakultas Hukum	Unversitas Ichsan Gorontalo	Sedang Berjuang Ijash

